



Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Melalui Pelayanan Kesehatan Terhadap Keluhan Penyakit Mata *Conjunctivitis* Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong

Garin Zaidan Nafi¹, Budi Priyatmono²

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: garinzaidan@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 20 September 2025

ABSTRACT

The fulfillment of prisoners' health rights is a crucial aspect of the correctional system, emphasizing principles of humanity and equality. This study aims to analyze efforts to fulfill prisoners' health rights, particularly regarding the management of conjunctivitis cases at Cibinong Class IIA Correctional Facility, as well as to identify barriers in its implementation. This research employed a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and document analysis to provide a comprehensive picture of healthcare services in the facility. The findings reveal that healthcare services have been reasonably adequate, including medical examinations, health education, and a referral system to external hospitals. Nevertheless, limitations in medical facilities, healthcare personnel, and overcrowded conditions remain significant challenges affecting service quality. The implications highlight the urgent need to improve medical infrastructure, strengthen human resources, and enhance cross-sectoral collaboration to ensure the sustainable fulfillment of prisoners' health rights.

Keywords: *Health rights, conjunctivitis, medical services, prisoners, correctional facility*

ABSTRAK

Pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yang menekankan prinsip kemanusiaan dan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemenuhan hak kesehatan narapidana, khususnya terkait penanganan penyakit mata konjungtivitis di Lapas Kelas IIA Cibinong, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelayanan kesehatan di Lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan telah berjalan cukup baik melalui pemeriksaan medis, penyuluhan, serta sistem rujukan ke rumah sakit. Namun, keterbatasan fasilitas, tenaga medis, dan kondisi overcrowding masih menjadi kendala signifikan yang memengaruhi kualitas layanan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas fasilitas medis, optimalisasi tenaga kesehatan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna menjamin terpenuhinya hak kesehatan narapidana secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Hak Kesehatan, Konjungtivitis, Layanan Medis, Narapidana, Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi fundamental yang harus dijamin bagi setiap individu, termasuk narapidana yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menegaskan kewajiban negara dalam memenuhi hak kesehatan bagi warga binaan. Hal ini sejalan dengan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)* yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan setara dengan standar masyarakat umum (United Nations, 2015). Dalam konteks pemasyarakatan Indonesia, pemeriksaan kesehatan awal dan layanan medis berkelanjutan menjadi langkah esensial untuk mendeteksi sekaligus mencegah penyakit menular, termasuk infeksi mata seperti konjungtivitis.

Tantangan pelayanan kesehatan di Lapas tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas, tetapi juga persoalan overkapasitas yang menyebabkan lingkungan rawan penyakit menular. Data menunjukkan bahwa tingkat hunian narapidana di Indonesia mencapai 190,4% kapasitas pada Januari 2025, kondisi ini jauh melampaui standar *World Health Organization (WHO)* yang menekankan pentingnya ruang memadai untuk kesehatan fisik dan mental narapidana (WHO, 2021). Keterbatasan tenaga medis dan obat-obatan juga memperparah kondisi ini, sehingga Lapas sering kesulitan memberikan layanan kesehatan yang optimal. Penelitian internasional menegaskan bahwa overcrowding memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya prevalensi penyakit menular, seperti tuberkulosis dan hepatitis, di dalam penjara (Walmsley, 2017).

Layanan kesehatan di Lapas juga harus memperhatikan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan lansia. Perempuan memerlukan layanan kesehatan reproduksi, anak memerlukan imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang, sementara lansia lebih rentan terhadap penyakit degeneratif. Prinsip non-diskriminasi dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* menegaskan bahwa hak kesehatan narapidana harus dipenuhi tanpa pengecualian (ICESCR, 1966). Dalam praktiknya, narapidana dengan penyakit menular seperti konjungtivitis membutuhkan layanan medis cepat, ruang isolasi, serta penyuluhan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit di lingkungan padat.

Selain aspek medis, pelayanan kesehatan di Lapas membutuhkan dukungan administrasi dan sistem rujukan yang memadai. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sistem rujukan yang baik dapat mempercepat penanganan penyakit serius sekaligus menjamin akses narapidana terhadap fasilitas kesehatan tingkat lanjut (Sogi, 2024). Kerja sama antara Lapas dengan rumah sakit rujukan menjadi instrumen penting dalam memenuhi standar kesehatan internasional. Dalam hal ini, koordinasi lintas sektor antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, serta lembaga terkait perlu diperkuat agar hak kesehatan narapidana tidak diabaikan.

Peningkatan mutu layanan kesehatan juga dapat dicapai melalui inovasi digital, seperti penggunaan sistem database pemasyarakatan untuk pencatatan

medis dan pemantauan kesehatan narapidana secara real-time. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi dalam layanan kesehatan penjara mampu meningkatkan efisiensi, memperkuat transparansi, dan mempercepat pengambilan keputusan medis (Wangmo et al., 2020). Selain itu, penyuluhan kesehatan berbasis teknologi dapat memperluas jangkauan edukasi narapidana, sehingga mereka lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan pelayanan kesehatan dilakukan terhadap narapidana dengan keluhan penyakit mata, khususnya konjungtivitis, di Lapas Kelas IIA Cibinong. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala utama dalam pelaksanaannya, baik dari aspek fasilitas, tenaga medis, administrasi, maupun kesadaran kesehatan narapidana, guna memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong, khususnya dalam penanganan penyakit mata konjungtivitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas lapas, tenaga medis, dan narapidana sebagai informan utama, observasi langsung terhadap proses pelayanan kesehatan di klinik lapas, serta dokumentasi berupa catatan medis, laporan resmi, dan data administratif terkait. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan temuan lapangan dan teori relevan. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan data sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi layanan Kesehatan dalam upaya Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan terhadap keluhan penyakit Congjunctivitis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong

Pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di Lapas Kelas IIA Cibinong, layanan kesehatan mencakup pencegahan, pengobatan, hingga pemantauan, dengan salah satu masalah umum yang sering muncul adalah konjungtivitis akibat infeksi virus atau bakteri. Melalui Teori Integrasi Pelayanan Kesehatan, pelayanan yang efektif memerlukan sistem terkoordinasi antara fasilitas medis, tenaga kesehatan, administrasi, dan layanan lanjutan. Pendekatan ini relevan untuk memastikan penanganan kesehatan di Lapas dilakukan secara holistik, mulai dari identifikasi penyakit, pengobatan, hingga pemantauan kondisi narapidana.

a) Fasilitas Medis

Lapas di Indonesia masih menghadapi keterbatasan fasilitas medis, umumnya hanya memiliki klinik sederhana tanpa ruang rawat inap, laboratorium, atau peralatan modern, dengan tenaga medis yang sangat minim serta suplai obat yang sering tidak mencukupi, termasuk untuk kasus konjungtivitis. Kondisi ini diperparah oleh buruknya sanitasi dan overkapasitas penghuni, sehingga penyakit menular mudah menyebar. Idealnya, penanganan konjungtivitis membutuhkan ruang isolasi, pemeriksaan rutin, edukasi kesehatan, dan obat yang memadai, namun keterbatasan fasilitas, tenaga medis, serta stok obat membuat penanganan kurang optimal, bahkan rujukan ke rumah sakit sering terkendala birokrasi dan minimnya ambulans. Dalam konteks teori integrasi, tenaga medis di klinik Lapas berperan penting dalam diagnosis, pengobatan, dan koordinasi rujukan, sehingga profesionalisme, keterampilan klinis, serta komunikasi efektif menjadi kunci untuk menjaga kualitas layanan kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit.

b) Aspek Administrasi

Administrasi di Lapas memegang peran penting dalam mengatur dokumentasi narapidana, pemenuhan hak-hak, hingga layanan kesehatan, termasuk pencatatan kasus medis, inventaris obat, jadwal tenaga medis, dan proses rujukan. Pengelolaan administrasi yang baik, misalnya melalui Sistem *Database* Pemasyarakatan (SDP), memudahkan pemantauan penyakit menular seperti konjungtivitis, menjaga ketersediaan obat, serta memastikan isolasi dan tindakan medis terdokumentasi. Administrasi yang akurat juga mendukung deteksi dini, pemantauan berkelanjutan, dan edukasi kesehatan, sehingga pencegahan penularan lebih efektif. Sebaliknya, kelemahan administrasi dapat memperlambat penanganan dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit, sehingga peningkatan kapasitas administrasi menjadi kunci optimalisasi layanan kesehatan di Lapas.

c) Pelayanan Lanjutan

Pelayanan lanjutan di Lapas menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana ketika fasilitas klinik tidak mampu menangani kasus penyakit menular seperti konjungtivitis. Dalam kondisi komplikasi atau infeksi berat, warga binaan dirujuk ke rumah sakit, seperti RSUD Cibinong, melalui koordinasi yang mencakup rekomendasi medis, penjadwalan, dan pendampingan sesuai prosedur keamanan. Koordinasi yang baik memastikan pengobatan sesuai standar, pemantauan pasca perawatan berjalan optimal, serta dokumentasi medis tercatat dengan rapi. Pelayanan lanjutan ini tidak hanya menjamin penanganan tepat dan berkesinambungan, tetapi juga mencegah komplikasi dan penularan lebih luas di lingkungan lapas, sekaligus menunjukkan komitmen lapas dalam memberikan layanan kesehatan setara dengan masyarakat umum.

d) Evaluasi Dan Pemantauan Lanjutan

Evaluasi dan pemantauan lanjutan di Lapas menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas penanganan konjungtivitis sekaligus melindungi

kesehatan warga binaan. Proses ini mencakup pemeriksaan medis berkala, pencatatan rekam medis yang rapi, serta penilaian efektivitas terapi sehingga komplikasi atau kegagalan pengobatan dapat segera ditindaklanjuti, termasuk melalui rujukan ke rumah sakit bila diperlukan. Evaluasi juga menilai keberhasilan edukasi *higiene* mata agar pencegahan penularan di lingkungan lapas berjalan efektif. Dengan penerapan Teori Integrasi Pelayanan Kesehatan, penanganan konjungtivitis di Lapas Cibinong dilakukan lebih terkoordinasi antara klinik lapas, rumah sakit, tenaga medis, dan administrasi. Hal ini memastikan pemenuhan hak kesehatan narapidana secara optimal, mulai dari diagnosis, pengobatan, edukasi, hingga tindak lanjut. Konjungtivitis sendiri merupakan peradangan pada konjungtiva yang ditandai dengan mata merah, gatal, berair, dan mudah menular di lingkungan padat seperti lapas, sehingga diperlukan pelayanan kesehatan memadai untuk mencegah penyebaran sekaligus menjaga kesejahteraan narapidana.

Pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIA Cibinong didukung oleh tenaga medis seperti dokter umum, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang kompeten, serta fasilitas dasar berupa ruang pemeriksaan, ruang obat, dan peralatan medis sederhana, termasuk obat untuk konjungtivitis. Namun, keterbatasan peralatan canggih membuat kasus serius harus dirujuk ke rumah sakit melalui prosedur rujukan resmi yang melibatkan pemeriksaan awal, surat rujukan, persetujuan administrasi, pengawalan ketat, hingga koordinasi dengan rumah sakit. Sistem pengelolaan obat di Lapas juga sangat penting untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan penggunaan obat yang tepat, termasuk obat tetes mata antibiotik, dengan pengawasan internal dan eksternal agar tidak terjadi penyalahgunaan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk menjamin standar pelayanan kesehatan berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih terkendala masalah overkapasitas dan keterbatasan fasilitas.

Oleh karena itu, peningkatan fasilitas seperti ruang isolasi, sanitasi, dan ketersediaan obat sangat dibutuhkan agar penanganan konjungtivitis lebih optimal. Profesionalisme tenaga medis juga berperan penting, mencakup kompetensi teknis, kepatuhan terhadap SOP, keterampilan komunikasi empatik, serta kemampuan mengelola stres di lingkungan yang penuh tantangan. Evaluasi rutin terhadap pelayanan dilakukan untuk memastikan efektivitas pengobatan dan perbaikan layanan. Dengan pengawasan, peningkatan fasilitas, sistem pengelolaan obat yang baik, serta profesionalisme tenaga kesehatan, Lapas Cibinong dapat memberikan layanan medis yang aman, efektif, dan humanis bagi narapidana, sekaligus memenuhi hak kesehatan mereka secara optimal.

Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Penyakit Konjungtivitis

Lapas Kelas IIA Cibinong di Kabupaten Bogor memiliki fasilitas pembinaan dan kesehatan yang memadai, termasuk Klinik Pratama yang meraih predikat Paripurna dari LAFKI dan Kemenkes sebagai bukti pelayanan kesehatan berstandar tinggi. Penanganan konjungtivitis di klinik ini dilakukan melalui

koordinasi lintas sektor dengan LAFKI, Kemenkes, dan RSUD Cibinong. LAFKI berperan dalam akreditasi dan pengawasan kualitas layanan, sementara Kemenkes menyediakan pedoman teknis, pelatihan, dan peningkatan kapasitas tenaga medis. RSUD Cibinong menjadi rujukan untuk kasus yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, dengan koordinasi intensif untuk memastikan efektivitas pengobatan dan pemantauan lanjutan setelah pasien kembali ke Lapas.

Kolaborasi ini memastikan narapidana memperoleh layanan komprehensif, mulai dari diagnosis, pengobatan, edukasi, hingga tindak lanjut sesuai standar nasional. Meski demikian, terdapat hambatan seperti overkapasitas penghuni, keterbatasan fasilitas medis, serta rendahnya kesadaran kesehatan narapidana yang memicu penyebaran cepat konjungtivitis. Kondisi ini menuntut penguatan fasilitas, edukasi kesehatan, serta peningkatan sistem pelayanan agar pemenuhan hak kesehatan narapidana tetap optimal.

Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan kepada Narapidana

Penyuluhan dan edukasi kesehatan di Lapas Kelas IIA Cibinong berperan penting dalam mencegah penyebaran penyakit menular, terutama konjungtivitis, sekaligus meningkatkan kesadaran narapidana akan pentingnya kebersihan diri dan lingkungan. Melalui penyuluhan, narapidana diberi pemahaman mengenai penyebab, gejala, serta cara pencegahan konjungtivitis, termasuk menjaga kebersihan tangan, tidak berbagi barang pribadi, dan segera melapor jika muncul gejala. Edukasi dilakukan melalui pertemuan langsung, poster, brosur, leaflet, maupun video yang ditempatkan di area strategis agar mudah diakses. Selain fokus pada konjungtivitis, penyuluhan juga mencakup kesehatan umum seperti perawatan gigi, kulit, pola makan sehat, olahraga, serta pengelolaan stres. Klinik Pratama juga menilai efektivitas program melalui kuis atau tanya jawab untuk memastikan narapidana memahami materi. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif narapidana dalam menjaga kesehatan diri, membentuk budaya hidup sehat di lingkungan Lapas, serta membekali mereka dengan pengetahuan bermanfaat untuk kehidupan setelah bebas. Dengan langkah terstruktur ini, penyuluhan diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, menekan penularan penyakit, dan mengurangi ketergantungan pada layanan medis.

Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan

Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan di Lapas Kelas IIA Cibinong sangat penting dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana, khususnya terkait penanganan konjungtivitis. Klinik Pratama melakukan pemeriksaan rutin, observasi gejala, serta meninjau efektivitas pengobatan dan kepatuhan narapidana terhadap instruksi medis, termasuk menjaga kebersihan mata dan penggunaan obat. Jika gejala tidak membaik, pengobatan dapat dievaluasi ulang atau narapidana dirujuk ke rumah sakit. Edukasi lanjutan juga diberikan untuk memastikan narapidana memahami cara mencegah penularan, seperti menjaga kebersihan tangan dan tidak berbagi barang pribadi. Selain aspek medis, pemantauan mencakup kebersihan lingkungan dengan memastikan sanitasi terjaga

untuk mencegah wabah penyakit. *Overcrowding* menjadi tantangan besar karena meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, menurunkan kualitas layanan kesehatan, serta memperburuk kondisi akibat keterbatasan tenaga medis dan fasilitas.

Rendahnya kesadaran kesehatan narapidana juga memperparah masalah, sehingga diperlukan program edukasi yang intensif serta kerja sama dengan RSUD Cibinong untuk memperlancar rujukan. Manajemen kepadatan penghuni, peningkatan fasilitas medis, dan penguatan penyuluhan kesehatan menjadi kunci untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Evaluasi berkala terhadap program kesehatan dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik narapidana agar pendekatan dapat terus diperbaiki. Secara keseluruhan, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan mencakup medis, edukasi, kebersihan lingkungan, dan perilaku, sehingga penanganan konjungtivitis lebih efektif, risiko penularan berkurang, dan hak kesehatan narapidana terpenuhi secara optimal.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong telah dilaksanakan melalui pemeriksaan medis rutin, penyuluhan kesehatan, dan sistem rujukan ke rumah sakit, namun masih menghadapi tantangan signifikan berupa keterbatasan fasilitas medis, jumlah tenaga kesehatan, serta kondisi *overcrowding* yang memperburuk penyebaran penyakit menular seperti konjungtivitis. Upaya peningkatan kualitas layanan perlu difokuskan pada perbaikan infrastruktur kesehatan, penambahan tenaga medis profesional, serta penguatan kerja sama lintas sektor agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar hak asasi manusia dan regulasi nasional. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan kesehatan yang lebih komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan sebagai prasyarat bagi terciptanya sistem pemasyarakatan yang humanis dan mampu menjamin hak dasar narapidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, F. H. (2018). Penerapan Sistem Database Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan ...*, 7(3), 327–336. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40610%0Ahttps://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/40610/26766>
- Afrizal, Samadi, & Rahman, A. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal*, 2(1), 1–19.
- Ajif, P. (2013). Pola Jaringan Sosial pada Industri Kecil Rambut Palsu di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Penelitian*, 31–40. [https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB III 09.10.033 Aji p.pdf](https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf)

- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (memilih diantara lima pendekatan). In *Penelitian Kualitatif*.
- Creswell, J. W., & Creswell. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Firmansyah, R., A.Rani, F., & Adwani, A. (2019). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 433. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10>
- Fitrian, A., Anwar, U., Ilmu Pemasarakatan, P., & Kunci, K. (2022). Optimalisasi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banjarnegara. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 12(2), 266–274.
- Hamzah, R. (2012). Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kabupaten Maros. *Digilib.Unhas.Ac.Id*, 1–141. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/O DQxMDcxZDA1OTU3NmMwZmJhNTM4ZDFmMzk1NGRIYzMwY2ExY2ZlMw==.pdf
- Hayka, M., Priyanto, H., & Nasution, H. (2017). Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Narapidana pada Lapas Klas IIA di Kota Pontianak. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JUSTIN) Vol.*, 5(3), 5–9.
- Irza, D., Pane, M., & Sebastian, I. (2023). PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DENGAN PENYAKIT MENULAR HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI (Healthcare Services for Prisoners with Infectious Disease HIV/AIDS in Correctional Institutions Class II A Binjai.). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 7–19. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/68536>
- Lestari, B. (2018). Hubungan Perilaku Dengan Angka Kejadian Konjungtivitis Pada Siswi Mts Putri Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat Tahun 2018. *Karya Tulis Ilmiah*, 1–92.
- Maghfirani, K., & Nurhafifah. (2022). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas Iib Sigli. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(3), 266–273. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/22895>
- Maharani, G. D., & Butar Butar, H. F. (2022). Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii B Wonosari. *Gema Keadilan*, 9(1), 36–56. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.15651>
- Melia Eka Rosita, M. Alif Fajri, & Anis Febri Nilansari. (2024). Efisiensi Sistem Penyimpanan Obat Di Beberapa Puskesmas Daerah Yogyakarta. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, 6(2), 2024.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nelwitis, N., Afrizal, R., & Noor, M. R. (2023). Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga

- Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 137–148. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008>
- Nurrahman, A. (2022). Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 104–111. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.598>
- Pendiawaty, L., & Sugiato. (2025). Kritik Politik Hukum Terhadap Sistem Pengawasan Layanan Makanan Di Lapas Dan Rutan. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(5), 1451–1456. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32179>
- Penisa, A. M., Andesta, G., Lofita, H., & Sitorus, L. E. V. (2024). Optimalisasi Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Konflik Antar Narapidana Demi Kesejahteraan Psikologis di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2831>
- Permana, S., Suhartini, E., & Ma'arif, R. S. (2024). Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6410–6427. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13446>
- Putra, B. M. (2018). Analisis Pelayanan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam: Indonesia. *Dialektika Publik: Jurnal Administrasi Negara* ..., 22–30. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/view/662>
- Putu Rai Yuliantini, N., & Gede Sudika Mangku, D. (2023). Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas Ii B Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 126–136.
- Ratnauli Sianturi, S., Prabawati, D., Widani, N. L., Lisum, K., Suprapti, F., Bobby, F., Rirendri, I. H., Elifati Gulo, K., Waruwu, O., & Prapenta Hia, P. S. (2024). Implementasi Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 517–523. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2612>
- Rizqi Sholehudin, M., & Wibowo, P. (2021). Dampak Overcrowding Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan di Lapas Kelas I Cirebon. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 1(7), 287–296. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i7.37>
- Sandra Wijaya, T., & Akbar Mulki Rahman, M. (2021). Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 124. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31462>
- Setyoadi, Cintia Melani, M., Wuri Kartika, A., & Dewi Sartika Lestari Ismail, D. (2024). Over Capacity Menyebabkan Kejadian Penyakit Kulit pada Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang. *Jurnal Keperawatan Cikini*, 5(2), 273–282. <https://jurnal.akperrscikini.ac.id/index.php/JKC>
-

-
- Siti Budiati Widyastuti, & Siregar, S. P. (2004). *Konjungtivitis Vernalis*. 5(4).
- SOGE, M. M. (2024). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Ditinjau Dari Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan. *Journal of Correctional Studies*, 1(1), 59–71. <https://doi.org/10.52472/jcs.v1i1.368>
- Sumenda, C. N., Mandagi, C. K. ., & Kolibu, F. K. (2017). Kajian Pelaksanaan Kesehatan terhadap Narapidana di Klinik Kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Kotamobagu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 1–9.
- Telaumbanua, R. F. (2020). Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 205–212. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.247>
- Utami, W. (2019). PENGARUH PERSEPSI STIGMA SOSIAL DAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PADA NARAPIDANA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Waqiah, N. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Makassar. *Journal of Lex Theory*, 2(2), 164–180.
- Zurimi, S. (2019). Pengaruh Pemberian Irigasi Mata dalam Mengatasi Kebutuhan Rasa Nyeri pada Pasien Konjungtivitis Suardi Zurimi. *2-Trik: Tunas-Tunas Riset Kesehatan*, 9(November), 394–398. <http://2trik.jurnalelektronik.com/index.php/2trik/article/view/348%0Ahttp://2trik.jurnalelektronik.com/index.php/2trik/article/download/2trik9418/9418>